

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PEMERINTAH ACEH (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh)

Oleh : RUSMAN, SE,MSi, Ak.

Dosen Tetap STIES Bsnda Aceh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sampel penelitian ditentukan sebanyak 43 pegawai dilingkungan Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sesuai kriteria yang ditetapkan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji one sampel (t-test) dengan alat bantu analisis SPSS 17., sehingga dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Aceh dengan studi pada Dinas Pendapaan dan Kekayaan Aceh pada umumnya telah dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan nilai reaktif baik (76 %). ,namun belum optimal (100%). Hasil uji t-test one sample menunjukkan bahwa bahwa nilai uji t-hitung lebih kecil dari t-tabel = ($-22.610 < 2.0181$) dengan nilai rata-rata (means) sebesar 76 %, (3.8163/5),.

Kata Kunci : Perlakuan Akutansi Aset tetap, PP Nomor 71 Tahun 2010.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan Penelitian

. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar diantaranya salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang perlakuan akuntansi aktiva tetap pada organisasi pemerintahan karena melalui perlakuan akuntansi aset tetap yang baik dan benar akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berguna bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi pemerintahan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 71 tahun 2010 adalah memuat standar akuntansi yang mengatur tentang perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. (Auliana, . 2014:13).

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh salah satu unit organisasi pemerintah Aceh selama ini telah mengelola akuntansi aset tetap sebagai bahan mempertanggung jawabkan melalui penyajian laporan keuangan daerah dengan mengacu Qanun Aceh (Undang-Undang Aceh) Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut terdiri dari pengakuan aset tetap, pengukuran, penilaian awal, unsure biaya aset tetap. pengeluaran setelah nilai awal dan sebagainya. Namun , pengelolaan akuntansi aset tetap Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh belum optimal/belum memadai atau belum tertib sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20110 tentang standard akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat ,

bahw sebagian Aset Tetap milik Pemerintah Aceh belum ditetapkan statusnya dan belum didukung dengan bukti yang memadai, hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang petugasa senior Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aeh..

Fakta lain menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK Aceh atas laporan keuangan Pemerintah Aceh Nomor 10.B /LHP/XVIII.BAC/05/2014 menyebutkan bahwa penataan usaha aset tetap belum memadai.

.Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah idengan diberi judul terse ut diatas

II. LANDASAN TEORITIS

2.1 Akuntansi Aset Tetap Pemerintah

Menurut Penyataan 07 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Peraturan Pemerintah Nomr 71 Tahun 2010 :170) mendefenisikan bahwa Akuntansi Aset Tetap adalah system pencetakan Aktiva Tetap yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam operasi organisasi pemerintahan/piblik, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Selanjutnya Penyataan 07 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, bahwa aset tetap *Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.* Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari asset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public.

2.2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintahan

2.2. 1 Pengakuan Aset Tetap

Menurut Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–2) menfdefisikan baahwa Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya PSAP (2010, 07 – 02) menjelaskan bahwa dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2.2.2 Pengukuran Aset Tetap

Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–03) menetapkan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. . Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.2.3 Penilaian Awal Aset Tetap

Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–07) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh

pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 59 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

2.2.4 Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap

Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–09) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08 Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

2.3.. Komponen Akuntansi Aktiva Tetap.

Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–09) dalam Nordiawan, Deddi,Putra,(2014:87) ..bahwa catatan akuntansi merupakan salah satu unsur dari perlakuan sistem akuntansi pokok yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap :

1. Kartu Aktiva Tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu.
2. Jurnal Umum
Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap, penghentian pemakaian aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap.
3. Register Bukti Kas Keluar
Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas.

Selanjutnya Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–08) menetapkan : Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, yaitu adalah:

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional
- (e) biaya konstruksi

2.4 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Pernyataan 07 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 :170) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Selain itu, Lampiran I.08 PSAP Standar Akuntansi Pemerintahan, (2010, 07–08 menjelaskan bahwa) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (aset tetap donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional. Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap yang telah dikemukakan, bahwa suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Aceh seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Pradigma Penelitian

2.8. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan terhadap teori dan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ni sebagai berikut:

Ho, Hipotesis Nol : Perlakuan akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh belum berjalan secara optimal.sesuai per atau stndar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai identitas dan krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah, yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik, sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dilingkungan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang berjumlah 120 orang, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pejabat struktural dilingkungan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang terkait menggunakan asset tetap..
2. Pegawai berstatus pegawai tetap atau PNS Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan akuntansi asset tetap.
3. Unsur pengawas baik pengawasan secara internal maupun eksternal.

Dari kriteria yang ditetapkan, jumlah pegawai Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang memenuhi kriteria sebanyak 43 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Populasi Yang memenuhi Kriteria

No	Unsur	Jumlah (orang/responden)
1	Sekretaris/Mewakili	1
2	Kepala Bidang Teknis	4
3	Kepala Seksi	12
4	Kepala UPTD	1
5	Staf Bagian Umum dan kepegawaian	5
6	Staf Bagian keuangan	5
7	Bagian Akuntansi Dan Verifikasi	15
	Total Populasi yg memenuhi kriteria	43

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yaitu :

1). Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan.

2) Studi Kepustakaan.

Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat

berguna bagi penyusunan penelitian ini. Studi pustaka juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya buku, majalah, ataupun jurnal..

3.4 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dimaksudkan untuk mengoperasionalkan dan atau operasional mendefiinisikan agar dapat diukur dengan cara tertentu. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Variable	Indikator	Ukuran	Skala
Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap	Perlakuan Aakuntansi Aktipa tetap merupakan salah satu unsur dari suatu system akuntansi yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu. (Peraturan Pemerintah No.71 Than 2010)	1. Pengakuan 2. Pengukuran 3. Penilaian 4. Penyusutan 5. Konstruksi 6. Pertukaran 7. Peneluaran lain 8. Kartu Aktiva Tetap 9. Jurnal Umum 10. Register Bukti Kas Keluar	1 – 5 1 – 5	Interval Interval Interval Interval Interval Interval Interval Interval Interval Interval

3.5 Metode Analisis Data

- 1) Membuat tabulasi data sesuai dengan jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dilakukan dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik nilai indeks dengan *skala liket* yaitu 1 sampai 5 berdasarkan jawaban responden. dengan demikian angka jawaban responden tidak dimulai dari nol (0) melainkan dari angka 1 sampai dengan 5..
- 2) Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi ,
- 3) Menentukan uji t-test satu sampel (menggunakan alat bantuan SPSS ..

3.6 Rancangan Pengujian Hipotesis :

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima hipotesa nol (h_0) artinya hipotesis diterima yaitu akuntansi aktipa tetap pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh belum optimal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku

- b. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesa nol ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu akuntansi aktipa tetap pada Dinas Pendapaan dan Kekayaan Aceh telah optimal/ sesuai standar akuntansi pemerintahn yang berlaku.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian Instrumen Data:

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Cronbach Alpha* sedangkan uji validitas menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Hasil dapat dilihat pada tabel 4.2 .

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliability
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.758	0.785	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	36.0465	6.998	0.410	0.521	0.745
BUTIR 2	35.8837	7.724	0.521	0.800	0.729
BUTIR 3	35.9535	7.522	0.408	0.595	0.740
BUTIR 4	35.9302	7.685	0.609	0.879	0.723
BUTIR 5	36.2093	7.408	0.467	0.597	0.731
BUTIR 6	36.1395	7.647	0.348	0.613	0.749
BUTIR 7	36.3488	7.804	0.441	0.613	0.737
BUTIR 8	36.2093	7.646	0.339	0.356	0.751
BUTIR 9	35.8837	7.581	0.589	0.891	0.722
BUTIR 10	36.2326	7.564	0.317	0.449	0.756

Dari tabel tersebut dapat dilihat Uji Reliabilitas dan Validitas sebagai berikut :

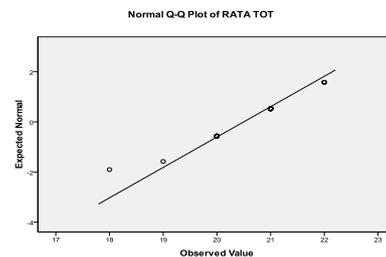
1. Pada bagian Reliabilitas Statistic terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbachs* hitung $0.758 > 0.3040$ pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05% atau Total *Alpha Cronbachs* diatas 50%, sehingga dapat dikatakan semua konsep

pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat reliable yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

2. Pada *Item Total Statistic*, Nilai *Corrected Item Total Correlation* (r) hitung $>$ r table (0.3040), maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 10) dapat dinyatakan valid.

4..4 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1: Uji Normalitas

Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari Gambar diatas disimpulkan bahwa model garis pada gambar 4-1 memenuhi asumsi normalitas
2. Dari hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa variabel perlakuan akuntansi Aset Tetap tersebut berdistribusi normal.

4..5. Pengujian Hipotesis Deskriptif.

Hasil uji t one sample sebagai berikut :

Tabel 4-4

One-Sample Test

	Test Value = 5					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
T- TEST	-22.610	42	.000	-.98372	-1.0715	-.8959

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
T- TEST	43	3.8163	0.28530	0.04351

Dari uji one sampel test dapat dilihat bahwa yaitu t- hitung (-22.610 lebih kecil dari t-tabel (2.0181)) = ($-22.610 < 2.0181$). Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya bahwa perlakuan akuntansi Aset Tetap Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dilaksanakan 76% , ($3.8163/5$), jadi relative baik namun belum optimal (100%).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Perlakuan akuntansi Aset Tetap pada pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh telah terlaksanan sebagaimana yang dimaksud Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dengan nilai relatif baik. Hasil uji t-test one sample menunjukkan bahwa bahwa nilai uji t-hitung lebih kecil dari t-tabel = ($-22.610 < 2.0181$) dengan nilai yang dicapai sebesar 76% , ($3.8163/5$), jadi belum optimal

5.2. Saran-saran

Dimasa mendatang, sebaiknya Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh meningkatkan secara optimal perlakuan akuntansi Aset Tetap ssebagaiman dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan menurut PP nomor 71 Tahun 2010, sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih akurat dan dapat diberikan penilaian wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa BPK Perwakilan Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Auliana. 2014. **Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang** Berdasar Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.
- Dian Sudaryati, (2013), **Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Dan Asxet Daerah Kota Tangerang Selatan**, Skripsi , Fakultas Ekomomi Universitas Pemasang;.
- Ghozali, Imam, Ratnomo, Dwi. 2008. **Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)** sesuai peraturan Perundang-Undangan Terbaru. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nordiawan,Deddi,Putra,(.2014).**Akuntansi Pemerintahan** Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah **Republik Indonesia Nomor 71, (Tahun 2010)** Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Restu Wedi Kartiko,(2010). **Asas Metodologi Penelitian. Graha Ilmu**. Jakarta Sodikin, Riyono. 2014. Akuntansi Pengantar 1. UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif**. Alfabeta. Bandung;
- Sugiyono. (2014), **Metode Penelitian Manajemen**,. Alfabeta. Bandung
- Septiana Tri. (2011). **Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungon Berdasarkan Standar Akuntansi**
- Yefta Masipuang dan Ventje Ilat, dan Sherly Pinatik, (2015), **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (KD) Kota Manado**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasSamRatulangi Manado.

